

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI (BIDANG : PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

=====
Tahun Sidang : 2006 - 2007
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 25 September 2006
Pukul : 09.00 WIB
Pimpinan Rapat : Drs. Theo L. Sambuaga
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti
Tempat : Ruang Rapat Komisi I Gedung Nusantara II Paripurna LT.1
Acara : 1. Pembukaan oleh Ketua Rapat
2. Penjelasan oleh Menhan dan Panglima TNI
3. Tanya Jawab
4. Penutup
Hadir Anggota : 45 orang dari 50 Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : Menteri Pertahanan RI, Sdr. Prof. DR. Juwono Sudarsono, MA
Panglima TNI, Sdr. Marsekal TNI Djoko Suyanto, S.IP
beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI pada hari Senin, tanggal 25 September 2006 dengan acara sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Sdr. Drs. Theo L. Sambuaga dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II KESIMPULAN

A. Menteri Pertahanan

1. Komisi I DPR RI minta agar Menhan memperjuangkan perundingan Defence Cooperation Agreement (DCA) dengan Pemerintah Singapura dengan tetap menjaga dan mengakomodasi kepentingan nasional semaksimal mungkin dan agar pemerintah menggunakan negosiasi tentang DCA sebagai posisi tawar untuk memperlancar dan mempercepat perundingan tentang ET (Extradition Treaty) dengan mengedepankan kepentingan nasional Indonesia

2. Sejalan dengan dukungan Komisi I DPR RI terhadap pengiriman pasukan TNI dalam kerangka UNIFIL ke Libanon, dan memperhatikan langkah pemerintah yang terutama karena alasan keterbatasan waktu dan kompatibilitas telah menempuh cara penunjukan langsung G to G dalam pengadaan 32 Panser VAB, Komisi I menerima proses pengadaan Panser tersebut dengan catatan tetap memenuhi ketentuan prosedur dan peraturan yang berlaku, prinsip transparansi, akuntabilitas dan menekan harga serendah mungkin, serta dengan memperoleh kualitas kendaraan tempur yang teruji dan dapat digunakan kembali dalam tugas TNI di Indonesia.
3. Menyikapi persoalan penyelewengan dana prajurit yang berlarut-larut yang telah merugikan keuangan negara, Komisi I DPR RI mendesak pemerintah agar mempercepat proses hukum kasus tersebut.
4. Sehubungan dengan semakin meningkatnya pengaduan ke DPR RI oleh kalangan purnawirawan TNI mengenai berbagai masalah tanah dan penghunian rumah, Komisi I DPR RI minta Menhan dan Panglima TNI agar menangani permasalahan tersebut berdasarkan prosedur, ketentuan, dan peraturan yang berlaku serta dengan pendekatan dialog dan memperhatikan kondisi hidup para purnawirawan tersebut. Dalam hubungan ini, untuk melaksanakan fungsi pengawasannya, Komisi I DPR RI senantiasa memberikan saran dan masukan untuk mencari solusi sebaik-baiknya atas masalah tersebut.

B. Panglima TNI

1. Komisi I DPR RI minta Panglima TNI agar melanjutkan dan mempercepat proses pengusutan kasus alm. Koesmayadi sampai pada proses hukum yang tuntas serta menginformasikan kepada masyarakat perkembangan tahapan-tahapan pengusutan secara berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
2. Komisi I DPR RI minta Panglima TNI agar rotasi pasukan TNI di daerah penugasan disesuaikan dengan kondisi daerah, dukungan anggaran dan psikologi pasukan di lapangan, dengan memperhatikan batas wajar bagi rotasi, serta juga memberikan masa transisi yang cukup bagi pasukan yang akan meninggalkan dan pasukan pengganti untuk memaksimalkan peran dan tugas pasukan pengganti yang baru di daerah operasi.
3. Komisi I DPR RI mendukung pembangunan jumlah dan kuantitas pos perbatasan yang memadai termasuk di daerah perbatasan dan pulau terdepan guna mengoptimalkan pengamanan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI, dan agar pembangunan pos perbatasan sebagai basis pertahanan diprioritaskan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.50 WIB.

KETUA RAPAT,

THEO L. SAMBUAGA

